

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang adalah suatu benda yang sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat transaksi maupun sebagai alat pembayaran yang sah, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau penjajahan oleh suatu negara kepada negara lainnya. Uang terdiri dari mata uang logam dan uang kertas. Mata uang logam adalah berupa uang yang terdiri dari bahan logam seperti emas, tembaga, perak, dan lain sebagainya, sedangkan uang kertas adalah uang yang terbuat dari lembaran kertas.

Uang kertas dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yakni uang kertas Negara dan uang kertas Bank. Uang kertas Negara adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara dan uang kertas Bank adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Bank yang ditunjuk pemerintah untuk membuat dan mengeluarkan uang kertas adalah Bank Indonesia.

Uang merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang dalam kebutuhan sehari-hari maka apabila dalam kebutuhan yang sangat mendesak orang akan membutuhkan bantuan dengan mengajukan pinjaman atau kredit

Adapun kegunaan dari uang, yaitu :¹

1. Sebagai Satuan Hitung
2. Sebagai alat transaksi

¹ Boediono, *Ekonomi Moneter*. BPFE. Yogyakarta, 1990, hlm. 10

3. Sebagai penyimpan nilai
4. Standar pembayaran di masa depan

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satunya perjanjian hutang – piutang antara debitur dan kreditur. Perjanjian hutang – piutang itu menimbulkan hukum antara keduanya dan menimbulkan hak dan kewajiban baik untuk debitur maupun kreditur yang dalam pelaksanaan pasti ditemukan permasalahan.

Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank diatur dalam pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu menyebutkan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Hubungan hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum yang dijamin oleh hukum atau undang-undang. hukum antara dua orang atau lebih yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain

berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang menuntut sesuatu disebut kreditur sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan disebut debitur.

Hubungan perjanjian kredit antara PD. BPR Bank karanganyar dengan Nasabah yaitu PD. BPR Bank karanganyar memberikan fasilitas kredit kepada nasabah dan nasabah menikmati fasilitas tersebut. Disini PD. BPR Bank karanganyar meminjamkan kredit dan nasabah adalah peminjam kredit.

Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis. Perjanjian kredit dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris.

Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dituangkan di dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian memenuhi segala kewajibannya dengan baik. Namun, di dalam perjanjian kredit tersebut ada kalanya satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Sebelum melakukan perjanjian kredit maka hal yang harus dipenuhi sebagai berikut:

Syarat sah nya perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan berbuat hukum
- c. Hal tertentu, dan
- d. Causa yang halal.

Perjanjian kredit hendaknya dibuat secara tertulis karena dalam bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan. Di dalam hukum perdata,

Bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapatkan kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Bank harus memperoleh keyakinan bahwa debitur dapat melunasi hutangnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kredit macet atau wanprestasi.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan

yang timbul karna undang – undang.² Terhadap tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melakukan perjanjian kredit di PD. BPR Bank Karanganyar maka pihak yang merasa di rugikan atas tindakan wanprestasi tersebut dapat meminta ganti kerugian atas suatu perbuatan wanprestasi karena tidak di penuhi kewajiban salah satu pihak dalam perjanjian kredit maka pihak yang merasa dirugikan langsung dapat menentukan jalur hukum lewat pengadilan negeri dengan cara mengajukan tuntutan gugatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum terhadap pihak yang telah merugikanya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya akan dituangkan dalam judul: **“TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR PADA PD. BPR BANK KARANGANYAR”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses perjanjian hutang – piutang antara kreditur dan debitur di PD. BPR Bank Karanganyar?
2. Bagaimana peraturan – peraturan serta hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur pada PD. BPR Bank Karanganyar?
3. Bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan pada perjanjian hutang – piutang pada PD. BPR Bank Karanganyar?

² Sudarsono, *kamus hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hlm 371

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh, proses perjanjian hutang – piutang antara kreditur dan debitur di PD. BPR Bank Karanganyar.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian hutang – piutang antara kreditur dan debitur di PD. BPR Bank Karanganyar.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan pada perjanjian hutang – piutang pada PD. BPR Bank Karanganyar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Manfaat untuk Penulis

Menambah cakrawala ilmu khususnya dalam ilmu hukum perjanjian yang menyangkut tanggung jawab hukum mengenai perjanjian hutang – piutang.

2. Manfaat Hasil Penelitian untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan pihak-pihak yang terkait dalam

masalah penelitian ini, dan berguna bagi pihak-pihak yang berminat pada masalah yang sama.

3. Manfaat Hasil Penelitian bagi Ilmu Pengetahuan

Menambah kontribusi ilmu hukum khususnya ilmu hukum perdata mengenai hukum perjanjian hutang.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas, hukum dalam tanggungjawab hukum terhadap pelaksanaan utang – piutang antara kreditur dengan debitur di “PD. BPR Karanganyar”

2. Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh mengenai tanggung jawab hukum

terhadap utang – piutang antara kreditur dengan debitur di “PD. BPR Karanganyar”

3. Sumber Data

Sumber data diperoleh baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dan menganalisa hukum. Dengan menggunakan bahan-bahan hukum penelitian yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

- a) KUH Perdata
- b) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang beratkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan ahli hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internet dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan

Dimaksudkan untuk mendapatkan data primer dengan melalui:

1) Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tanggung jawab hukum terhadap perjanjian hutang – piutang antara kreditur dan debitur pada PD. BPR Bank Karanganyar maka penulis mengambil lokasi penelitian di “PD. BPR Bank Karanganyar” Cabang Colomadu JL. Adi Sucipto, Paulan Kulon, Paulan, Colomadu, Karanganyar.

2) Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah :

- a) Kepala “PD. BPR Bank Karanganyar” Cabang Colomadu
- b) Karyawan/Karyawati “PD. BPR Bank Karanganyar” Cabang Colomadu

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dapat diperoleh dengan melalui :

a) Penelitian Kepustakaan

Diperoleh dengan melalui mengumpulkan dan mempelajari kedua bahan hukum tersebut diatas.

b) Penelitian Lapangan

Diperoleh dengan melalui dua cara yaitu :

1) Kuisisioner

Yaitu memperoleh data dengan cara memberikan daftar pertanyaan oleh penulis dimana tiap pemasalahan berkaitan dengan masalah penelitian.

2) Wawancara

Yaitu cara memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, pewawancara (penulis), yaitu yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode analisa data kualitatif yaitu mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku literatur yang berhubungan dengan tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja kemudian dipadukan dengan pendapat responden dilapangan yang setelah itu mencari pemecahan yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam mempelajari penjabaran isi dari penelitian ini dan dapat memberikan gambaran mengenai penelitian ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Masalah
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian perjanjian hutang – piutang

B. Pihak – pihak perjanjian dalam hutang – piutang

C. Peraturan yang berlaku dalam hutang – piutang

D. Perjanjian antara para pihak dalam hutang – piutang

E. Hubungan antara para pihak

F. Hak dan kewajiban para pihak

G. Tanggung jawab hukum berdasarkan:

1. Wanprestasi
2. Perbuatan melawan hukum

H. Berakhirnya perjanjian

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Proses perjanjian hutang – piutang antara kreditur dan debitur dalam PD. BPR Bank Karanganyar.
2. Hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan perjanjian hutang – piutang antara kreditur dan debitur di PD. BPR Bank Karanganyar..
3. Tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan pada perjanjian hutang – piutang pada PD. BPR Bank Karanganyar.

BAB IV PENUTUP